



Koran	Hal
Haluan	23
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# TP4D Awasi Proyek di RSUD Lubuk Sikaping

**PASAMAN, HALUAN** – Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di RSUD Lubuk Sikaping, Pasaman, kini diawasi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Adapun proyek pembangunan yang tengah diawasi itu adalah pembangunan gudang farmasi dengan pagu anggaran Rp550 juta, pembangunan lanjutan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan dana Rp1.499 miliar, dan pembangunan gedung OK

dua lantai dengan anggaran Rp3.396 miliar. Direktur RSUD Lubuk Sikaping, dr. Yong Marzihalli, mengatakan, pengawasan oleh TP4D ini bertujuan untuk mengurangi penyimpangan pembangunan infrastruktur. Pengawasan itu

dilakukan juga untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan yang tertera dalam kontrak kerja.

“Kami berharap semua pihak yang terlibat dalam program pembangunan infrastruktur tersebut bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Pembangunannya harus yang terbaik, mutu harus diutamakan, pekerjaan harus dikebut agar selesai tepat waktu,” ujarnya setelah mendampingi TP4D meninjau sejumlah proyek infrastruktur di rumah sakit itu.

Peninjauan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Adhryansah, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pasaman, Ihsan; dan sejumlah pejabat teras rumah sakit.

“Kita hanya mendampingi TP4D untuk memantau pengerjaan sejumlah proyek. Apa yang disampaikan Bapak Kajari dan tim tadi hendaknya menjadi pedoman bagi kita,” ucapnya.

Pengelola RSUD, kata Yong, terus berbenah, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan, agar masyarakat Pasaman maupun warga di luar

daerah itu lebih nyaman berobat ke rumah sakit tersebut.

Sementara itu, Adhryansah mengutarakan, selain sebagai bentuk upaya pencegahan, kunjungan itu untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan pembangunan infrastruktur. Kegiatan turun langsung itu juga bagian dari tugas kejaksaan sebagai tim TP4D.

“Salah satu tugas TP4D adalah melakukan pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Artinya, tujuan utama dari agenda ini lebih kepada

pencegahan,” tuturnya.

Selain itu, kata Adhryansah, peninjauan itu dilakukan agar semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh anggaran negara tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dengan demikian, pihaknya berharap berbagai kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aturan, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

“Ada tiga fokus utama yang perlu diperhatikan: faktor administrasi, aspek legalitas, dan faktor fisik. Ini satu kesatuan yang tidak bisa

dipisahkan,” ucapnya.

Ia meminta agar pelaksanaan pengerjaan proyek ini dilakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani, baik menyangkut jumlah, mutu, maupun ketepatan waktu kerja. Selain itu, ia meminta penyerapan anggaran harus dioptimalkan.

“Kami meminta hati-hati, baik rekanan maupun manajemen RSUD. Sekali lagi, utamakan mutu jika tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib,” kata Adhryansah. (h/yud)